

## PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, TRANSPARANSI, DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Mandy Tania Sari  
mandytania29@gmail.com  
Titik Mildawati

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA

### ABSTRACT

*This research aimed to examine the effect of management accountability of Village Funds Allocation, Transparency, and Village Policy on society welfare of Kletek Village, Sidoarjo, While, the independence variables were management accountability of Village Funds Allocation, Transparency, and Village Policy. Moreover, the dependent variable was Society Welfare. The research was quantitative Furthermore, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 100 respondents as simple. For the instruments, it used questionnaires, in addition, there were multiple linear analysis with SPSS 18.0. The research result concluded management Accountability of Village Fund Allocation, Transparency, and Village Policy had positive effect on society welfare. It could be proved as its management accountability of village funds and every cash flow had been presented systematically and accountably in the financial statement. Besides, transparency were also applied as there was banner in front of kelurahan office. In addition, the village policy had considered good enough since having policy which prioritize local building and implement effectively. All of them were used to improve facilities and solve poverty as it could increase the society welfare.*

**Keywords :** *accountability, management accountability of village funds allocation, transparency, village policy, society welfare*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat studi kasus desa Kletek kabupaten Sidoarjo. Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa. Sedangkan variabel dependennya adalah kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Selain itu teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling yang pemilihan sampelnya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan 100 responden. Data diperoleh dengan cara membagikan kuesioner. Analisis data penelitian menggunakan analisis linier berganda dengan program SPSS versi 18.0. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini dibuktikan dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa setiap aliran dana yang masuk dan keluar telah disajikan dalam laporan keuangan yang di susun secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi juga telah dilakukan dengan adanya bukti banner yang terpasang pada halaman depan kantor kelurahan. Kebijakan desa cukup baik dengan membuat kebijakan yang memprioritaskan pembangunan daerah dan kemudian dilaksanakan secara efektif guna meningkatkan sarana dan prasarana dan menanggulangi kemiskinan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

**Kata kunci :** akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa, kesejahteraan masyarakat

### PENDAHULUAN

Pemerintahan di negara Indonesia sekarang ini masih terus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional, agar laju pembangunan daerah maupun pembangunan desa dan kota semakin serasi dan seimbang. Oleh karena itu, terdapat unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya berdampak langsung pada kepentingan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan desa,

pemerintahan desa mempunyai kedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah di negara Indonesia, sehingga desa mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur sendiri dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah juga memberikan wewenang kepada pemerintah desa agar dapat lebih mandiri dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa beserta masyarakatnya dalam mengembangkan potensi desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu, pemerintah juga membuat kebijakan untuk perwujudan desentralisasi keuangan desa yang mandiri yaitu dengan pembentukan Alokasi Dana Desa.

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pemerintahan terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya untuk menggunakan sumber dana yang ada ataupun yang telah diterima. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan berpendapat. Maka dari itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik.

Untuk setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pejabat negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, warga negara mempunyai hak untuk mengetahuinya (*right to know*). Warga negara diharapkan dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan dengan dilaksanakannya transparansi. Selain itu, peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal itu juga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Keterbukaan keuangan meliputi terbukanya akses informasi terhadap sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus disajikan dengan jelas. Sehingga dapat memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui informasi yang akan dilaporkan. Selain digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, masyarakat awam juga dapat mengetahui dan mengakses informasi tersebut dengan mudah sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kinerja pemerintah atas penggunaan sumber daya dapat terpenuhi.

Transparansi dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa dimaksudkan sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka. Prinsip transparansi menjamin setiap orang agar memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, semuanya harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri 113 tahun 2014).

Kebijakan pemerintah merupakan suatu keputusan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya. Penentuan kebijakan pemerintah harus didukung dengan respon positif dari seluruh masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk mentaati dan menjalankan kebijakan pemerintahan. Kebijakan desa merupakan salah satu bentuk kebijakan yang harus disusun oleh aparat desa untuk menjalankan tanggungjawab desa yang tetap berada dalam pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Dalam setiap desa, kebijakan yang diambil pasti berbeda-beda. Hal itu dikarenakan pada lingkungan desa tersebut norma-norma yang ditetapkan berbeda. Maka setiap desa dapat menentukan sendiri dan menetapkan kebijakan dalam memecahkan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan desa.

Tingkat kesejahteraan yang belum terpenuhi menyebabkan ketertinggalan, kemiskinan, keterpurukan ekonomi yang terjadi secara terus menerus. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat perekonomian rakyat. Strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yaitu

dengan cara pemerataan pengalokasian pendanaan untuk kelancaran pelaksanaan program-program guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih layak.

Adapun strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia yaitu dengan meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasilnya dengan melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di daerah pedesaan. Pembangunan desa sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi dengan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Peningkatan terhadap pemerataan pembangunan yang memadai beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja dari masyarakat khususnya tempat pedesaan merupakan suatu strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat diketahui bahwa hampir seluruh penduduk Indonesia memilih untuk bertempat tinggal dan menetap di daerah pedesaan dengan alasan di pedesaan memiliki jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial dan akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi dana desa harus dialokasikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam hal penggunaannya, Alokasi Dana Desa masih rawan terhadap penyalahgunaan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Dibutuhkan peran dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana yang diperoleh dari pemerintah dan dibutuhkan pula adanya peningkatan kinerja aparatur desa dan badan pengawasan desa. Alokasi Dana desa sendiri merupakan salah satu dari program pemerintah yang mempunyai pengaruh sangat tinggi terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Desa di Desa Kletek pada tahun 2016 masih rendah, hanya dari yang menyumbang PAD secara rutin dan pendapatan lainnya sampai saat ini belum ada dan masih sebatas hanya iuran dari pihak ketiga yang ada di desa Kletek. Namun, program-program yang tersusun dalam RPJM sudah terlaksana kegiatannya. Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran (Profil Desa).

Ketertarikan peneliti dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, sejauh mana peran dari alokasi dana desa, dan bagaimana pengaruh transparansi dan kebijakan dari suatu pemerintah desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Dengan penelitian ini diharapkan tujuan dari pemerintah mengalokasikan dana pemerintah pusat dan daerah untuk bisa membantu program desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diharapkan pula dapat tercapai tujuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakatnya sehingga penerapan dalam pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

## TINJAUAN TEORITIS

### *Stewardship Theory*

*Stewardship theory* diasumsikan mengenai sifat manusia yang pada hakekatnya dapat dipercaya, dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. *Stewardship* dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang mempunyai peran penting bagi sebuah pencapaian tujuan organisasi.

Teori *Stewardship* merupakan gambaran situasi dimana para manajer atau para eksekutif lebih pada kepentingan organisasi, tidak terfokus pada tujuan individual dan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya. Dalam sistem

keperintahan, pemerintah sebagai steward bertugas untuk bergerak sesuai dengan keinginan dan harapan principal meraka yaitu masyarakat. Perilaku *Steward* tidak akan meninggalkan organisasinya hal itu dikarenakan *Steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Selain dari pada itu pemerintah melakukan berbagai perencanaan kegiatan dan pengoperasian kegiatan mereka untuk tujuan masyarakat. Yang dimaksud dari tujuan masyarakat disini merupakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang menjadi tujuan para *Steward* guna kepentingan sasaran organisasi pemerintahan, pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada principal dalam pelaksanaan tugasnya.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Menurut Sari (2018) akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban penggambaran atas kinerja dari suatu organisasi untuk pimpinan kepada pihak yang membutuhkannya, dengan membuat laporan yang mampu dipertanggungjawabkan atas pengelolaan suatu sumber pendanaan atau keuangan, menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

### **Transparansi**

Menurut Mardiasmo (2006) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan mudah diawasi pelaksanaannya oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban secara horizontal antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pula pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

### **Kebijakan Desa**

Kebijakan merupakan suatu pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut dalam melaksanakan suatu program untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan desa adalah produk hukum yang mana setiap pemerintah secara hukum mempunyai wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Dalam peraturan desa sudah tertuang kebijakan yang mengatur tentang desa yang mana peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan suatu otonomi yang independen melainkan juga tanggung jawab otonomi. Hal itu dikarenakan desa dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Namun, meskipun demikian desa tetap mempunyai wewenang dan hak berpartisipasi untuk menentukan arah pembangunan nasional dan pembangunan desanya sendiri secara khusus.

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menunjukkan ukuran tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang pangan, murahnya biaya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera.

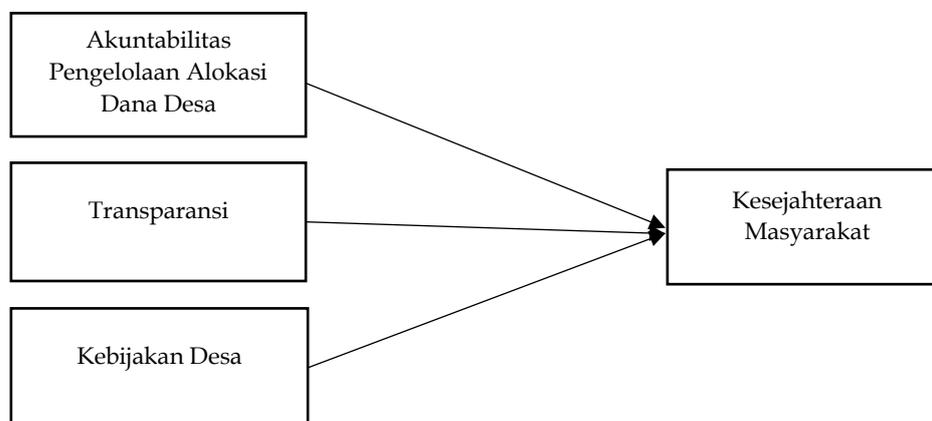
### **Penelitian Terdahulu**

Berikut ini penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini : 1. Umami dan Nurodin (2017) Menyatakan Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, 2. Dura (2016) Menyatakan Alokasi dana desa dan kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan

masyarakat, 3. Tahir (2018) Menyatakan Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, 4. Sari (2018) Menyatakan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

### Rerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah diuraikan di atas, berikut ini gambaran dari rerangka konseptual dalam penelitian ini :



Gambar 1  
Rerangka Konseptual

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Penggunaan dana sangat efektif terutama pada pengembangan ekonomi desa untuk memberdayakan masyarakat. Peran serta pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa pada proses perencanaan pembangunan masyarakat selalu aktif ikut. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tepat guna dan tepat sasaran akan mampu menjadikan pemberdayaan masyarakat desa yang sangat mandiri dan berproduksi dengan baik.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan peran aktif pemerintahan desa dalam mengelola pemberdayaan dalam pembiayaan kebutuhan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada sangat dibutuhkan. Pencairan dana yang mudah dan pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan ketentuan sesuai dengan peraturan yang ada akan semakin mempererat hubungan pemerintah desa dengan masyarakatnya sehingga mampu mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan yang diinginkan.

Berbagai pemaknaan kebijakan Alokasi Dana Desa yang telah dijalankan sesungguhnya mempunyai tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintah di level bawah yaitu desa. Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang awalnya dominan dan sentralistis, melalui metode ADD berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Melalui keleluasaan yang diperoleh dari metode ADD ini diharapkan dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan mentimulasi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Komang, Tunga, dan Pradana (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa yang baik. Akuntabilitas sendiri merupakan prinsip dari pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan kemudian dipertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat.

H<sub>1</sub> : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat

### **Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat dalam mengelola keuangan dana dengan memberikan informasi melalui berbagai media, sehingga masyarakat ataupun pihak yang membutuhkan informasi dapat mengakses secara mudah. Informasi yang dimiliki desa tersebut terutama pada keuangan desa yang sangat membutuhkan perhatian dalam penggunaannya. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban secara horisontal antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Sehingga dengan transparansi akan menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Selain dari pada itu, akan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat karena masyarakat ikut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dalam kegiatannya membiayai pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Komang, Tunga, dan Pradana (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dana desa yang baik akan membuat masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah desa, kepercayaan yang tinggi dalam mengelola keuangan dan desa mampu menepis kecurigaan maupun menyelesaikan permasalahan yang ada didalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah desa akan semakin mendorong kinerja pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga akan memberikan kenyamanan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Disamping pemerintah desa mengemban tugasnya sebagai pengelola keuangan desa yang dipercaya masyarakat dengan dasar peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Pemerintahan pusat menginginkan untuk menyajikan laporan keuangan yang andal mampu dipertanggungjawabkan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penawasan dan pelaporan kegiatan yang telah dibiayai.

H<sub>2</sub> : Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat

### **Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Sengaji (2018) menjelaskan bahwa Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan Masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pemerintah mampu memberikan layanan dan berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Dana desa berperan penting untuk membuat kebijakan dalam pembangunan infrastruktur desa serta melaksanakan program-program desa.

Pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengurus desanya, terutama dalam hal memberikan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dan keswadayaan, prakarsa, inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa memberikan otonomi kepada desa dengan memberikan kewenangan untuk membuat dan mengatur kebijakan-kebijakan tentang desa terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

H<sub>3</sub> : Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, berdasarkan karakteristik masalahnya penelitian ini menggunakan metode penelitian kasual komparatif (*Casual-Comparative Research*). Metode ini digunakan untuk mengetahui atau menguji hubungan sebab akibat yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Variabel independen atau variabel yang

mempengaruhinya adalah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa, terhadap variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhi adalah kesejahteraan masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang bertempat tinggal di desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling* jenis ini menggunakan metode penetapan *sample* dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya. Sampel dalam penelitian ini mempunyai kriteria sebagai berikut: (1) penduduk yang bertempat tinggal di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. (2) Pendidikan terakhir minimal SMA. (3) Memiliki profesi atau pekerjaan tetap yang terdiri dari PNS, pedagang, karyawan, wirausaha, dokter, TNI, polisi, pengrajin dan lain-lain.

### **Teknik pengumpulan data**

#### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data subjek dan dokumenter. Data subjek merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan opini yang diberikan oleh responden berupa jawaban kuesioner yang sudah dibagikan. Sedangkan data dokumenter adalah data yang berisi arsip atau dokumenter dari suatu kejadian maupun pihak yang terlibat dengan kejadian tersebut. Data dokumenter ini dalam bentuk arsip yang telah dimiliki mengenai laporan keuangan alokasi dana desa yang telah digunakan pemerintah desa Kletek dalam melaksanakan tugasnya. Serta dokumen lainnya sebagai data pelengkap seperti foto, arsip dan otentik lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 2 sumber data yaitu (1) Data primer adalah data yang digunakan dalam penelitian ini dengan membagikan kuesioner kepada responden dengan mengajukan beberapa butir pertanyaan secara personal kepada masyarakat Desa Kletek yang telah dipilih oleh peneliti, dan (2) Data Sekunder merupakan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang sudah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Sedangkan dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan adalah dokumen laporan keuangan tahunan APBDesa, laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Teknik Penentuan Skor**

Dalam penelitian skor, peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan pembagian kuisisioner kepada responden yang telah dipilih oleh peneliti dan yang sesuai kriteria yang ditentukan. Responden diberikan pilihan jawaban yang telah tersedia didalam kuisisioner yang telah diberi skor disetiap butir pilihannya. Agar data yang diperoleh dapat diolah dengan menggunakan analisis kuantitatif, maka jawaban responden dalam kuisisioner diukur dengan menggunakan skala *likert* dengan menggunakan skala *likert* dengan 5 alternatif jawaban, yaitu: Sangat Tidak Setuju ( STS) dengan skor 1, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, Ragu- Ragu (RR) dengan skor 3, Setuju (S) dengan skor 4, Sangat Setuju (SS) dengan skor 5.

### Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran atau mendiskripsikan variabel-variabel penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa. Penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), varian maksimum - minimum dari setiap proksi penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pernyataan dalam bentuk skala likert untuk setiap variabelnya. Pernyataan yang terdapat dalam variabel independen mengenai pernyataan yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa. Sedangkan dalam variabel dependen adalah pernyataan mengenai kesejahteraan masyarakat. Dimana kuesioner dari keempat variabel tersebut berjumlah 20 pernyataan yang terbagi-bagi sebagai berikut: 3 pernyataan yang digunakan untuk mewakili variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, 3 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel transparansi, 7 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel kebijakan desa, dan 7 pernyataan untuk mewakili variabel kesejahteraan masyarakat.

Dari penelitian ini responden diminta untuk memberikan penilaian melalui kuesioner yang telah diberikan tentang pandangan mereka mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa dan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan metode pengukuran kuesioner skala likert dengan skor 1 sampai 5 yang artinya skor 1=sangat tidak setuju, skor 2=tidak setuju, skor 3=ragu-ragu, skor 4=setuju, skor 5=sangat setuju. Berikut hasil pengujian statistik deskriptif variabel :

**Tabel 6**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	100	2	5	4,21	0,76499
Transparansi	100	2	5	4,22	0,67202
Kebijakan	100	2	5	4,25	0,55033
Kesejahteraan	100	2	5	4,15	0,72645
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Kuesioner 2019, diolah

Berdasarkan Tabel 6 hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (APADD) diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 3 pernyataan pada skala likert 5 poin, nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan sebesar 4,21, hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden dalam variabel ini dikatakan baik serta dihasilkan nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Sedangkan nilai standar deviasi dalam penelitian ini adalah 0,76499, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data yang cukup beragam.

Berdasarkan Tabel 6 hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (TPADD) diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 3 pernyataan pada skala likert 5 poin, nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan sebesar 4,22, hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden dalam variabel ini dikatakan baik serta dihasilkan nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Sedangkan nilai standar deviasi dalam penelitian ini adalah 0,67202, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data yang cukup beragam.

Berdasarkan Tabel 6 hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Desa (KD) diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 7 pernyataan pada skala likert 5 poin, nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan sebesar 4,25 hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden dalam variabel ini dikatakan baik serta dihasilkan nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Sedangkan nilai standar deviasi dalam penelitian ini adalah 0,55033, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data yang cukup beragam.

Berdasarkan Tabel 6 hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Kesejahteraan Masyarakat (KSM) diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 7 pernyataan pada skala likert 5 poin, nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan sebesar 4,15, hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden dalam variabel ini dikatakan baik serta dihasilkan nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Sedangkan nilai standar deviasi dalam penelitian ini adalah 0,72645, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data yang cukup beragam.

## Hasil Penelitian

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk menghitung korelasi antara skor yang diperoleh dari tiap item pertanyaan-pertanyaan dengan skor totalnya. Penentuan nilai validitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi uji  $r$  pada output SPSS. Suatu item atau butir pertanyaan pada kuesioner tersebut dapat dikatakan valid jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Sedangkan jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ , maka dapat dikatakan bahwa tiap butir item atau kuesioner tersebut tidak valid.

#### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menentukan apakah kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi mengenai pertanyaan kuesioner tersebut. Uji reliabilitas digunakan tujuannya untuk menguji konsistensi data yang dikumpulkan. Pengujian reliabilitas kuesioner menggunakan rumus cronbach's alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach's alpha  $>$  0,60 (Sunyoto, 2011:68).

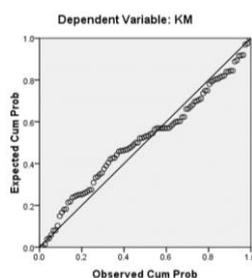
#### Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Ada beberapa uji asumsi klasik pada penelitian ini, yaitu terdiri dari :

#### Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen, dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data yaitu dengan cara Normal Probability Plot, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Hasil uji normalitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 3

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Sumber : Kuesioner 2019, diolah

Berdasarkan output hasil uji dengan cara Normal Probability Plot, hasil uji normalitas data dalam penelitian ini diperoleh serta disimpulkan bahwa pada gambar diatas dapat dilihat titik-titik disekitar garis diagonal menyebar dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini berdistribusi normal karena memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas ini dilakukan dengan cara melihat nilai TOL (Tolerance) dan VIF (Variance Inflation Factor) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Batasan yang dipakai adalah jika  $VIF < 10$  dan  $TOL > 0,1$  maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	0.814	1.228
Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	0.937	1.068
Kebijakan Desa	0.813	1.23

a. Dependent Variable : KSM

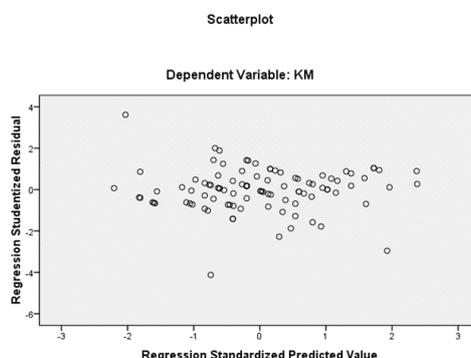
Sumber : Kuesioner 2019, diolah

Berdasarkan Tabel 9 diatas, diketahui dari masing-masing variabel yaitu akuntabilitas alokasi dana desa (APADD), transparansi pengelolaan alokasi dana desa (TPADD), kebijakan desa (KD) memiliki nilai  $VIF < 10$  dan  $TOL > 0,10$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi yang terbentuk. Sehingga model regresi ini dikatakan baik.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastiditas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ini terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji heterokedastisitas adalah dengan menggunakan metode grafik scatterplot.

Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat terdeteksi dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED yang ditunjukkan pada gambar 4 berikut ini.



Gambar 4

Sumber : Kuesioner 2019, diolah

Berdasarkan Gambar 4 diatas, menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang terbentuk dalam penelitian ini atau dengan kata lain bersifat homokedastisitas. Dapat dilihat pada gambar tersebut, titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol sumbu regression studentized residual. Titik-titik tersebut juga tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan tujuan mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut ini adalah hasil uji regresi linear berganda.

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig
1 (Constant)	0,023	0,412		0,055	0,956
APADD	0,166	0,058	0,212	2,878	0,005
TPADD	0,465	0,058	0,548	7,972	0
KD	0,356	0,098	0,269	3,644	0

Sumber : Kuesioner 2019, diolah

Berdasarkan output Tabel 10 diatas, persamaan regresi dapat dibentuk sebagai berikut :  
 $KSM = 0,023 + 0,166 APADD + 0,465 TPADD + 0,356 KPF + \epsilon$

Penjelasan nilai konstanta dengan koefisien persamaan regresi linear berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut : (a) Koefisien regresi untuk variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (APADD) bernilai positif yaitu 0,166 artinya tanda positif menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa mempunyai hubungan searah (positif) dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami kenaikan sebesar 0,166. (b) Koefisien regresi untuk variabel transparansi pengelolaan alokasi dana desa (TPADD) bernilai positif yaitu 0,465 artinya tanda positif tersebut menunjukkan bahwa variabel transparansi pengelolaan alokasi dana desa mempunyai hubungan searah (positif) dengan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap transparansi pengelolaan alokasi dana desa maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami kenaikan sebesar 0,465. (c) Koefisien regresi untuk variabel kebijakan desa (KD) bernilai positif yaitu 0,356 artinya tanda positif menunjukkan bahwa variabel kebijakan desa mempunyai hubungan searah (positif) dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan kebijakan desa maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami kenaikan sebesar 0,356.

### Hasil Uji Hipotesis

#### Analisis Koefisien Determinasi (Adjust R Square)

Pengujian koefisien determinasi digunakan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen. Adjust R Square merupakan koefisien determinasi yang telah dikoreksi dengan jumlah variabel dan ukuran sampel sehingga dapat mengurangi unsure bias jika terjadi penambahan variabel maupun ukuran sampel. Berikut terdapat tabel yang akan menyajikan hasil pengujian koefisien determinasi.

**Tabel 11**  
**Koefisien Determinasi**

R	R Square	Adjusted R Square	Error of the Estimate
0,759 <sup>a</sup>	0,576	0,562	0,23666

a. Predictor: (Constant), APADD, TPADD, KD

b. Dependent variable: KSM

Sumber : Kuesioner 2019, diolah

Dari hasil pengujian pada Tabel 11 menunjukkan bahwa angka koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjust R Square) yaitu sebesar 0,562 atau 56,2% yang artinya bahwa besarnya pengaruh signifikan antara variabel independen akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (APADD), transparansi pengelolaan alokasi dana desa (TPADD), kebijakan desa (KD) terhadap variabel dependen kesejahteraan masyarakat (KSM) adalah sebesar 0,562 atau 56,2% . sedangkan 0,438 atau 43,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui atau diteliti.

### Uji F

Uji F atau uji kelayakan model dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh dari variabel akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Model ini dikatakan layak atau cocok apabila nilai signifikansi  $F < \alpha 0,5$ , sebaliknya model dikatakan tidak layak apabila nilai signifikansi  $> \alpha 0,5$ . Berikut dapat dilihat hasil uji kelayakan model (Uji F) pada perhitungan statistik dibawah ini:

**Tabel 12**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	7,293	3	2,431	43,402	0,000 <sup>a</sup>
Residual	5,377	96	0,056		
Total	12,670	99			

a. Predictor: (Constant), PPP, SMP, KPF

b. Dependent variable: KMP

Sumber : Kuesioner 2019, diolah

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 12 di atas dapat menunjukkan bahwa hasil hitung nilai F sebesar 43,402 dengan signifikan 0,000 yang mana signifikan tersebut  $< 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian. Artinya seluruh variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa dikatakan layak untuk menjelaskan variabel kesejahteraan masyarakat.

### Uji t

Dalam pengujian ini bertujuan untuk menguji koefisien regresi dengan mengetahui apakah masing-masing variabel independen yaitu akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (APADD), transparansi pengelolaan alokasi dana desa (TPADD), kebijakan desa (KD) berpengaruh terhadap variabel dependen kesejahteraan masyarakat (KSM).

Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, yang artinya bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikansi terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_1$  ditolak, yang artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikansi antar variabel independen terhadap dependen.

**Tabel 13**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig
1 (Constant)	0,023	0,412		0,055	0,956
PPP	0,166	0,058	0,212	2,878	0,005
SMP	0,465	0,058	0,548	7,972	0,000
KPF	0,356	0,098	0,269	3,644	0,000

Sumber : Kuesioner 2019, diolah

Berdasarkan perhitungan hasil uji t pada Tabel 13 diatas, menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. (1) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (APADD) berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai positif dan nilai signifikansi yaitu sebesar  $0,005 < 0,05$ . Disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang menandakan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. (2) Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (TPADD) berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai positif dan nilai signifikansi yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$ . Disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang berarti menandakan bahwa variabel transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. (3) Kebijakan desa (KD) berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai positif dan nilai signifikansi yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$ . Disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti bahwa variabel kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

## Pembahasan

### Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini didapatkan bahwa variabel independen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Dalam hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$ . Sehingga hal ini berarti bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komang, Tungga, dan Pradana (2017), Sari (2018), Tahir (2018) akuntabilitas pengelolaan dana desa secara teknik maupun administratif dikatakan baik apabila pengelolaan dari seluruh keuangan desa mampu dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan secara jelas dan rinci mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan hingga pertanggung jawaban sehingga masyarakat memberikan kepercayaannya kepada pemerintah desa.

Tujuan akuntabilitas keuangan yaitu menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam mengambil keputusan ekonomi pada masa yang akan datang. Jika laporan keuangan desa dilaksanakan dengan baik maka kinerja pemerintah desa akan meningkat.

Dalam akuntabilitas terkandung suatu keharusan bagi pemerintah untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak hanya sebatas laporan pertanggungjawaban. Namun juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, secara langsung maupun tak langsung, secara lisan atau tulisan. Sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Pada penelitian ini variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut para responden pemerintah desa telah melakukan pertanggungjawaban diukur dengan adanya penyajian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang sesuai dan adanya laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang dipublikasikan menggunakan banner dan dipasang didepan kantor kelurahan.

Setiap aliran dana yang masuk dan keluar telah disajikan dalam laporan keuangan daerah. Selain itu juga terdapat rincian penggunaan dana yang telah dikeluarkan untuk berbagai kegiatan operasional desa maupun kegiatan penyelenggaraan desa. Dalam APBDesa juga terdapat perincian seluruh pendapatan desa baik yang diperoleh dari luar desa maupun dalam desa, belanja dan pembiayaan yang ada.

### **Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini didapatkan bahwa Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan Masyarakat. Dalam hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga hal ini berarti bahwa variabel transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Adanya keterbukaan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan keterbukaan terkait laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Transparansi dalam arti menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Dalam hal ini, yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif yang artinya pemerintah desa sudah memenuhi hak masyarakat dengan melakukan keterbukaan atau transparansi. Menurut masyarakat keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dirasa sudah cukup. Laporan keuangan desa merupakan bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktifitas pengelolaan sumber daya publik.

Transparansi keuangan pada desa Kletek sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa supaya masyarakat memperoleh informasi secara luas mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Hal itu sesuai dengan prinsip dimana masyarakat bebas mengetahui informasi sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan desa dan memberikan kepercayaan terhadap perangkat desa dalam pengelolaan dana ADD, dibuktikan dengan adanya media informasi dalam mengungkapkan pengelolaan keuangan seperti banner yang dipaparkan pada depan halaman kantor kelurahan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Umami dan Nurodin (2017) yang mengungkapkan bahwa transparansi memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Maka dari itu, dalam pengelolaannya yang transparan dan akuntabel harus patuh dan sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mulai dari perencanaan hingga pelaporan yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini didapatkan bahwa pada variabel independen yaitu Kebijakan Desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga berarti bahwa variabel kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016) yang mengungkapkan bahwa kebijakan desa yang baik yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat dan yang akan memberikan dampak pada pembangunan desa yang semakin baik. Kebijakan desa disusun berdasarkan dari keluhan masyarakat atau adanya permasalahan yang telah dihadapi oleh masyarakat setempat. Kemudian pemerintah desa membuat kebijakan desa yang memprioritaskan program pembangunan supaya dapat dilaksanakan secara efektif guna meningkatkan sarana dan prasarana dan menanggulangi kemiskinan. Suatu susunan kebijakan desa yang telah disusun pemerintah desa diharapkan dapat disepakati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya tekanan dari pemerintah desa.

Menurut (IDM Desa Kletek, 2019) Program Pembangunan desa yang telah dilaksanakan semenjak Masa REPELITA merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja pemerintah. Kemudian seiring bergulirnya waktu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggulirkan Program ADD. Akan tetapi, dana ADD sekarang ini lebih menjangkau kegiatannya, khususnya dalam kegiatan rutin desa dan bidang pembangunan desa. Walaupun kegiatan ADD merupakan stimulant namun pelaksanaan ADD sangat membantu roda pemerintahan desa. Sebelum adanya pelaksanaan kegiatan, diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terlebih dahulu. Musyawarah tersebut telah menghasilkan beberapa jenis kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa Kletek maupun Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hasil- hasil pelaksanaan MUSRENBANGDES dibagi 2 (dua) kegiatan : (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yaitu kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (Lima) tahun kedepan yang tertuang pada APBDDesa. (b) Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa (RKP) merupakan Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBDDesa yang telah disahkan dengan lembaga desa yang ada untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh desa dengan dana PAD, dana ADD dan dana lainnya yang sah tidak mengikat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun yang dituangkan dalam RKPDesa. Adanya pengaruh positif antara kebijakan desa dengan kesejahteraan masyarakat dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi sebagian masyarakat. Dengan semakin banyaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mempermudah perekonomian maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur pengaruh variabel independen yaitu akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. penelitian ini dilakukan di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sebagai sampel penelitian dengan menetapkan kriteria tertentu sesuai penelitian untuk memperoleh sampel. Telah didapatkan sampel total sebanyak 100 orang dengan 50 responden berjenis kelamin laki-laki dan 50 responden berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Variabel Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan desasecara jelas dan terperinci. (2) Variabel Transparansi terdapat pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini menjelaskan bahwa transparansi pada Desa kletek sudah mampu memberikan hak keterbukaan dan transparan kepada masyarakat. Pemerintah desa memberikan keterbukaan dengan adanya banner yang mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dipasang didepan kantor kelurahan dan juga memberikan kemudahan untuk mengakses dan memperoleh

informasi mengenai program dan pengelolaan keuangan alokasi dana desa. (3) Variabel Kebijakan desa mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan kebijakan merupakan suatu tindakan baik dari pemerintah untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada suatu desa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan pada desa Kletek sudah berupaya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan pembangunan dan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakatnya secara adil dan berkelanjutan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah (1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lainnya diluar model yang diteliti pada penelitian ini. Diharapkan model penelitian selanjutnya bisa lebih baik dari penelitian ini. Diharapkan pula menambah kuesioner sesuai dengan kondisi peneliti sehingga dapat memberikan jawaban yang rinci dan valid. (2) Penelitian ini hanya menggunakan satu desa saja. Untuk penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk melakukan penelitian di lebih dari satu desa atau melakukan penelitian pada satu kecamatan dan disarankan pula untuk memperluas sampel agar hasil penelitian lebih digeneralisasikan.

### Keterbatasan

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut: (1) Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel dalam menguji pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi pengelolaan alokasi dana desa, dan kebijakan desa. Sedangkan masih banyak variabel lain yang mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. (2) Penelitian ini hanya menggunakan jawaban kuisisioner dengan responden masyarakat desa setempat dan tanpa didukung dengan wawancara. (3) Pada penelitian ini hanya dilakukan pada satu desa yaitu Desa Kletek dan sampel penelitian terbatas pada kriteria yang telah ditentukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dura, Justita. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Naskah Publikasi*. STIE Asia Malang.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BPUD). Semarang.
- Hanifah, Suci Indah. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Naskah Publikasi*. STIESIA Surabaya.
- Indriantoro, N dan Supomo, B. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Komang, A., A. Tungga A. dan M. Pradana. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan. *E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 2(1).
- Kurniawati, Yuli. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung dan Kelembagaan Kampung terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Naskah Publikasi*. FEB UNCEN.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance: Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*, LAN BPK RI. Jakarta.
- Makalalag, Astri Juainita, Nangoi, Grace b, dan Karamoy, Herman. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamabagu. *Naskah Publikasi*. Universitas Sam Ratulangi.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2093. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.
- Putra, Candra Kusuma, Pratiwi, Ratih Nur, Suwondo. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Naskah Publikasi*. Universitas Brawijaya Malang.
- Sari, A. N 2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Sengaji, I. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya
- Sunyoto, Suyanto. 2011. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Yogyakarta.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. alfabeta. Bandung.
- Suliyanto. 2011. *Ekonomi Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Mediakom. Yogyakarta.
- Tahir, Erni. 2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Umami, R., Idang dan Nurodin. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* 6(11).